



ARTICLE



Kepemimpinan Perempuan dan Ketahanan Pangan: Upaya Bupati Irna Narulita dalam Penguatan Pangan Lokal di Pandeglang

Bayu Nurrohman¹, Yeby Ma'asan Mayrudin^{2*}

^{1,2} Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

How to cite: Nurrohman, B. Mayrudin, Y.M (2021). Kepemimpinan Perempuan dan Ketahanan Pangan: Upaya Bupati Irna Narulita dalam Penguatan Pangan Lokal di Pandeglang. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 12(2)

Article History

Received: 26 Oktober

Accepted: 1 November 2021

Keywords:

Woman leadership,
Food security,
Local food,
Pandeglang Regency

Kata Kunci:

Kepemimpinan
Perempuan,
Ketahanan Pangan,
Pangan Lokal,
Kabupaten Pandeglang

ABSTRACT

This study examines the efforts of woman local leader, namely Pandeglang Regent Irna Narulita in preparing food security in her region. This research is important because in the midst of the issue of gender mainstreaming and woman leadership, it is necessary to continue to work on it as a dedication to the central role of women. The researchers also wanted to analyze the leadership of woman local leader who are currently serving in building food strengthening. This research will provide another perspective in research because it will focus more on women's leadership in strengthening food, while other research on women's leadership sees more of women's representation. The locus of this research is in Pandeglang Regency, Banten Province, because seeing Pandeglang Regency is one of the areas led by woman. Furthermore, Pandeglang an area that still has a very wide potential of agricultural land in Banten. We use a qualitative method with a case study approach. The results of this research present the strengthening of food in Pandeglang Regency through the B2SA program and local food commodities (talas beneng and porang) that have been exported. Then the leadership of "Bupati" Irna was able to be more transformational than transactional. Because of its ability to encourage staff and stakeholders to work together to achieve common goals.

ABSTRAK

Penelitian ini memotret bagaimana upaya kepala daerah perempuan yaitu Bupati Pandeglang Irna Narulita dalam menyiapkan ketahanan pangan di daerahnya. Urgensi dari riset ini adalah karena di tengah isu pengarusutamaan gender dan woman leadership yang perlu terus dikerjakan sebagai dedikasi terhadap peran sentral kaum perempuan. Tim peneliti juga ingin menganalisis kepemimpinan kepala daerah perempuan yang sedang menjabat dalam membangun penguatan pangan. Riset ini akan memberikan perspektif lain dalam penelitian karena akan lebih memfokuskan pada kepemimpinan perempuan dalam penguatan pangan, sementara riset lainnya mengenai kepemimpinan perempuan lebih banyak melihat keterwakilannya sebagai representasi perempuan. Locus dari penelitian ini berada di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Karena melihat Kabupaten Pandeglang adalah salah satu daerah yang dipimpin oleh perempuan. Lebih lanjut Kabupaten Pandeglang juga merupakan daerah yang masih memiliki potensi lahan pertanian

* Corresponding Author

Email : aldilan.yeby@untirta.ac.id

yang sangat luas di Provinsi Banten. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun hasil riset ini menyajikan penguatan pangan di Kabupaten Pandeglang melalui program B2SA dan komoditas pangan lokal (talas beneng dan porang) yang marketnya sudah ekspor. Kemudian kepemimpinan Bupati Irna mampu lebih bersifat transformasional dibandingkan transaksional karena mampu mendorong jajaran dan para pemangku kepentingan bahu membahu mewujudkan tujuan bersama.

A. PENDAHULUAN

Kerawanan pangan menjadi momok bagi kelangsungan hidup manusia, dari dahulu kala hingga saat ini di era pandemi Covid-19 (Arndt et al., 2020; Farcas et al., 2021; Hamadani et al., 2020; Mishra & Rampal, 2020; Nchanji & Lutomia, 2021). Pangan merupakan segala hal yang berasal dari sumber hayati baik dari produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang dipergunakan dan dimanfaatkan sebagai makanan atau minuman yang bisa dikonsumsi oleh manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Kuiper & Cui, 2021; Nicholson et al., 2021; Purwaningsih, 2008; Sastrosupandi, 2019). Maka ketersediaan pangan menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi suatu negara bahkan wilayah dalam mempertahankan kesejahteraan masyarakatnya. Tanpa adanya pangan, sebaik apa pun sumber daya manusia yang dimiliki tidak akan bisa bertahan hidup karena keberadaan pangan merupakan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia (Laborde, Martin, Swinnen, & Vos, 2020; Molotoks, Smith, & Dawson, 2021; Suharyanto, 2011; Suryana, 2008).

Pentingnya ketersediaan pangan inilah yang membuat setiap daerah di Indonesia mencoba untuk mencari formula dan cara yang terbaik agar bisa memenuhi kecukupan pangan di wilayahnya (Suryana, 2008). Ketersediaan pangan memang tidak harus selalu pada setiap negara atau daerah itu memiliki lahan pertanian yang luas untuk memproduksi pangan, namun ketersediaan pangan juga bisa melalui cara lain seperti mendatangkan pangan dari wilayah lain, atau menjadi negara atau daerah yang menerima pangan dari negara atau daerah lain (Nicholson et al., 2021; Suharyanto, 2011; Zurayk, 2020).

Beberapa wilayah memang terkenal dengan potensi pangannya, dalam produksi padi misalnya sangat lekat Cianjur dengan beras pandan wanginya ataupun Kabupaten Tuban dengan produksi jagungnya (wawancara dengan Heni 2021). Namun semua pencapaian pangan tersebut tidak bisa lepas dari peran seorang pemimpin dalam memaksimalkan potensi pangan yang ada di wilayahnya dalam memenuhi ketersediaan pangan. Peran seorang pemimpin sangat krusial dalam ketahanan pangan karena seorang pemimpin di daerah memiliki wewenang sebagai pengambil keputusan sehingga dia bisa menetapkan program kerja apa yang akan dia lakukan dalam melaksanakan penguatan pangan di wilayahnya.

Beberapa hal di atas memang menunjukkan bahwa dalam ketahanan pangan di suatu wilayah tidak bisa lepas dari peran kepala daerahnya. Seorang pemimpin memang dituntut untuk bisa memengaruhi seluruh elemen yang ia pimpin agar mampu bekerja dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ia tetapkan sebelumnya. Seorang pemimpin yang punya kesadaran tentang pentingnya pangan, tentu akan memaksimalkan potensi yang ada untuk membentuk penguatan pangan.

Dewasa ini konsep tentang kepemimpinan semakin berkembang seiring dengan semakin meluasnya konsep tentang gender di Indonesia. Kepemimpinan perempuan menjadi hal yang

menarik untuk dibahas terlebih bila melihat kinerjanya dalam memimpin suatu wilayah (Alaslan, 2017; Anshor, 2008; Artisa, 2014; Balkis, 2020; Famelasari & Prastiwi, 2021; Godjali & Mayrudin, 2020; Hartono, 2021; Nurrohman & Ramadhan, 2020; Zahra, 2020). Kepemimpinan perempuan di Provinsi Banten memang menunjukkan keterwakilan yang luar biasa sebesar 50% atau setengahnya dari kepala daerah di Provinsi Banten adalah seorang perempuan. Menariknya dua kabupaten yang memiliki potensi lahan pertanian yang besar adalah Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang keduanya dipimpin oleh pemimpin perempuan. Maka akan sangat menarik ketika kita bisa memadukan konsep kepemimpinan perempuan dalam peran mereka untuk mengupayakan ketahanan pangan di wilayahnya.

Sebagai salah satu wilayah yang punya potensi yang besar pada lahan pertanian, Kabupaten Pandeglang memang menjadi harapan bagi Provinsi Banten untuk terus bisa memproduksi pangan dengan maksimal. Pangan di daerah ini memang bisa dibilang stabil karena ketersediaan lahan yang masih luas dan juga didukung dengan masih banyaknya petani yang aktif menggarap lahannya menjadi lahan produktif. Ketersediaan pangan ini juga membuat Kabupaten Pandeglang memiliki banyak alternatif pangan pokok untuk dikonsumsi selain nasi seperti singkong dan jagung. Petani yang variatif dalam menanam beragam jenis pangan juga menjadi salah satu nilai lebih yang dimiliki daerah dengan ikon Badak ini. Sumantri dkk. (2021) menyampaikan bahwa “potensi dan ketersediaan lahan di Kabupaten Pandeglang cukup luas yang didominasi oleh lahan kehutanan, persawahan, dan perkebunan besar dengan data hutan campuran 86.517,33 Ha atau sekitar 31% dari luas penggunaan lahan di Kabupaten Pandeglang. Sedangkan 18,24% dari luas penggunaan lahan di Kabupaten Pandeglang dengan luas lahan 50.888,90 Ha terdiri dari hutan belukar. Luas lahan persawahan 34.391,28 atau sekitar 12,32% dari luas penggunaan lahan dan penggunaan untuk ladang adalah 47.893,65 atau 17% dari luas penggunaan lahan” (Sumantri, Hermita, Riyanto, & Mulyaningsih, 2021).

Namun pangan di Kabupaten Pandeglang bukan tanpa adanya permasalahan. Menurut hasil penelitian IPB (Sumantri et al., 2021) memberikan data bahwa sekalipun ketersediaan lahan masih sangat luas di Pandeglang ternyata masih ada Desa yang mengalami kerawanan pangan di Pandeglang. Permasalahan lain seperti kegagalan panen juga kerap terjadi karena ketika bencana banjir datang maka akan merendam lahan pertanian sehingga gagal tumbuh. Kecamatan Cisata, Patia, dan Sindangresmi adalah tiga kecamatan yang menjadi langganan banjir ketika curah hujan mulai deras.

(Cahya, Wibowo, & Bukhari, 2018) menegaskan bahwa adanya kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan produksi beras di Pandeglang harus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan jumlahnya untuk menjaga ketersediaan beras di kabupaten tersebut.

Fenomena yang beragam inilah yang membuat Pandeglang ternyata juga harus memiliki seseorang yang mampu mengatur dan memberikan kebijakan dalam perlindungan terhadap ketersediaan pangan dan penguatan pangan agar ketahanan pangan bisa tercapai. Dari berbagai macam permasalahan yang telah dijelaskan di atas, riset ini mencoba untuk melihat bagaimana peran pemimpin perempuan sebagai kepala daerah (Bupati) yakni Irna Narulita dalam mengupayakan ketahanan pangan di Kota Sejuta Pesantren ini.

Urgensi pembahasan dalam artikel ini ialah wacana pengarusutamaan gender dan *female leadership* perlu terus menjadi perhatian yang penting untuk membongkar persoalan berupa hambatan-hambatan secara kultural dan struktural seperti patriarki, patrimonial, dan eksklusivitas terhadap peran kaum perempuan di berbagai ranah. Atas dasar itu, tim peneliti ingin menganalisa laku kepala daerah perempuan yang sedang menjabat dalam membangun penguatan pangan di daerahnya.

Lokus dari Penelitian ini berada di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Karena melihat Kabupaten Pandeglang adalah salah satu daerah yang dipimpin oleh perempuan.

Lebih lanjut Kabupaten Pandeglang juga merupakan daerah yang masih memiliki potensi lahan pertanian yang sangat luas di Provinsi Banten. Maka kami ingin menjawab persoalan tentang bagaimana penguatan pangan di Kabupaten Pandeglang sebagai salah satu upaya pengembangan keilmuan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bagian ini, tim penulis akan menyajikan beberapa tinjauan kepustakaan terkait dengan konsepsi kepemimpinan yang menyelidik tawaran definisi dari beberapa sarjana. Selanjutnya kami mendiskusikan topik kepemimpinan perempuan secara diskursif. Kemudian memaparkan konsepsi ketahanan pangan termasuk di dalamnya juga sedikit menjelaskan tentang pangan lokal. Setelah itu, kami coba menuliskan research gap kajian terdahulu dengan riset yang kami kerjakan ini.

Kepemimpinan

Selama berabad-abad, kepemimpinan hanya dilihat sebagai kualitas pribadi. Bahkan Konfusius (475 SM) tidak menawarkan definisi tentang kepemimpinan, ia sekedar menekankan perlunya pemimpin untuk berbudi luhur dan menjaga orang-orang yang berada di sekitarnya. Begitu pun Plato hanya menyebut pemimpin harus bijaksana. Sedangkan bagi Machiavelli pemimpin harus memiliki kebajikan dan kecerdasan untuk mendapatkan dukungan dari rakyat (Silva, 2016).

Kajian tentang kepemimpinan disebut oleh Grint (2011) terus berkembang secara transformatif dan dinamis. Ia menyebut bahwa studi tentang kepemimpinan pada dekade 1900 berangkat dari diskusi perihal "*Great Man*". Namun dalam perjalanannya konsep tersebut mengalami perkembangan dengan memfokuskan -tidak hanya pada sosok sang pemimpin akan tetapi juga memerhatikan- pada persoalan diskursif tentang "*Distributed Leadership, Followership, Identity, and Mission-Command*" (Grint, 2011).

Atas dasar itu, berikut ini pendefinisian kepemimpinan yang telah diformulasikan oleh Charles J. Keating (1986), Gary Yukl (2001), Bernard M. Bass (2008), dan James M. Burns (1978). Mari kita awali dengan pendapat Keating mengenai kepemimpinan merupakan suatu proses dengan berbagai cara memengaruhi orang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan bersama (Keating, 1986).

Selanjutnya Yukl coba menawarkan konsep kepemimpinan ialah proses untuk memengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama (Yukl, 2001).

Adapun Bass menyampaikan gagasannya tentang kepemimpinan yaitu interaksi antara dua atau lebih anggota kelompok yang sering melibatkan penataan mengenai persepsi dan harapan para anggota. Pemimpin sebagai agen perubahan, yang tindakannya memengaruhi orang lain lebih dari tindakan orang lain memengaruhi mereka. Kepemimpinan dapat dipahami sebagai mengarahkan perhatian anggota lain untuk tujuan dan jalan untuk mencapainya (Bass & Bass, 2008).

Kemudian definisi yang cukup berbeda diformulasikan oleh Burns yaitu kepemimpinan ialah selaku pemimpin ia mampu mendorong pengikutnya untuk bertindak demi tujuan tertentu yang mewakili nilai-nilai dan motivasi -keinginan dan kebutuhan, aspirasi dan harapan- baik pemimpin maupun pengikut. Dan kegeniusan kepemimpinan terletak pada cara para pemimpin melihat dan bertindak atas nilai dan motivasi mereka dan pengikutnya (Burns, 1978). Artinya kepemimpinan itu beroperasi ketika seseorang memobilisasi sumber daya institusional, politis, psikologis, dan sumber-sumber lainnya untuk membangkitkan, melibatkan, dan memenuhi motivasi pengikutnya (Burns, 1978; Yukl, 2001).

Dari ilmuwan Indonesia pun yaitu (Kartono, 2009) turut menawarkan konsep kepemimpinan dan landasan nilai yang harus melekat pada diri pemimpin. Ia menyatakan empat aspek yang mendasari kepemimpinan yaitu: memiliki kemauan untuk memikul tanggung jawab, Kemampuan untuk menetapkan prioritas secara tepat, kemampuan untuk menanggapi secara objektif, dan kemampuan untuk berkomunikasi

Sesungguhnya masih banyak lagi pendefinisian yang ditawarkan oleh para sarjana seperti yang sudah didaftar oleh (Silva, 2016; Winston & Patterson, 2006). Akan tetapi dalam tulisan ini tim penulis akan mengoperasionalkan konsepsi Kartono dan Burns. Hal ini didasarkan pada konsepsi mereka tidak hanya membedah sekedar personal sang pemimpin melainkan juga mencakup nilai dasar yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin dan diskursus mengenai *distributed leadership, followership, identity, dan mission-command* yang menarik untuk ditelusuri secara mendalam.

Kepemimpinan Perempuan

Kepemimpinan perempuan ditegaskan oleh Bass & Bass (2008) dinilainya lebih transformasional daripada transaksional. Kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan salah satunya dapat dijabarkan dalam posisi mereka sebagai pemimpin pemerintahan. Perempuan sebagai pemimpin publik juga dituntut untuk bisa mempengaruhi dan menggerakkan orang lain dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang dipimpin. Berikut lima ciri yang dimiliki pemimpin perempuan (Fitriani, 2015; Nurrohman & Ramadhan, 2020):

Pertama, kemampuan untuk membujuk, pemimpin perempuan dinilai lebih bisa menggerakkan organisasi karena karakter yang dimiliki perempuan menunjukkan kemampuannya lebih bisa melakukan tindakan persuasif dengan bahasa maupun *gesture* yang dimiliki. Perempuan lebih punya kekuatan untuk mempertahankan keinginannya, sehingga dia bisa melakukan sesuatu yang memaksa anggota bergerak menuju tujuan organisasi. Kemampuan persuasif dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi merupakan salah satu kelebihan yang bisa diberikan oleh pemimpin perempuan dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin publik.

Kedua, membuktikan kritikan yang salah, pemimpin perempuan juga cenderung lebih sensitif. Dia bisa menerima berbagai kritik dan saran dengan beragam respons. Perasaan yang terganggu karena kritik yang diterima bisa memacu semangat mereka untuk membuktikan kepada berbagai pihak jika kritik yang diberikan bisa saja salah bahkan jikapun benar, kritik itu bisa dijadikan pemacu untuk memperbaiki kinerja.

Ketiga, semangat kerja tim, pemimpin perempuan tentu dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya merasa sangat memerlukan kerja tim. Perempuan cenderung tidak sentralistis karena sadar akan keterbatasannya dalam bergerak, namun keterbatasan ini menuntut perempuan dalam jabatan publik untuk memaksimalkan peran dari seluruh anggota dan masyarakat untuk bekerja bersama-sama dalam memajukan wilayah yang dia pimpin.

Keempat, sang pemimpin, pemimpin perempuan bisa memancarkan aura karismatiknnya dengan cara dia bisa selalu hadir dan menyelesaikan beragam permasalahan yang timbul dalam organisasi sehingga mampu meningkatkan kepercayaan anggota dan juga masyarakat yang dia pimpin.

Kelima, berani mengambil risiko, Pemimpin perempuan juga memiliki karakter bertaruh. Untuk mencapai apa yang dia inginkan untuk organisasi, dia bisa melakukan apa pun dan memaksimalkan segala sumber daya yang ada. Pemimpin perempuan juga ambisius terhadap capaian yang ia ingin buktikan kepada masyarakat secara luas.

Ketahanan Pangan

Pada bagian ini kami menelusuri keanekaragaman indikator tentang ketahanan pangan. Ada beberapa sajian indikator yang ditawarkan oleh para sarjana, seperti Jones dkk dalam (Nicholson et al., 2021) yaitu: *food availability*; *food access*; *food utilization*; dan *stability over time*. Sedangkan (Kuiper & Cui, 2021) menawarkan tiga indikator yaitu *food availability*; *food accessibility*; dan *food utilization*. Diskursus mengenai ketahanan pangan terus berkembang, meski ada sedikit perbedaan namun gagasan kuncinya masih serupa. Hal ini dapat dilihat dari sajian yang ditawarkan oleh akademisi (Purwaningsih, 2008) dalam konteks Indonesia ada beberapa penekanan sebagai berikut, yaitu: (1) Ketersediaan pangan (*food availability*), dalam hal ini pangan secara kuantitas maupun kualitas mampu memenuhi kebutuhan pangan pada suatu Negara. Pangan dengan kuantitas yang cukup belum tentu memiliki kualitas yang baik. Maka pangan yang memenuhi kriteria ketersediaan adalah pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Negara baik secara jumlah maupun mutu dari pangan tersebut; (2) Keamanan pangan (*food safety*), pangan yang terbebas dari berbagai kontaminasi bahan-bahan yang berpotensi menghilangkan kandungan gizi bahkan membuat pangan tersebut malah memberikan dampak yang tidak baik jika dikonsumsi. Keamanan pangan dilakukan dengan memastikan produksi pangan tidak terganggu dan tercampur dengan cemaran-cemaran dari bahan-bahan yang berpotensi memberikan racun; (3) Kemerataan pangan, pendistribusian pangan yang merata kepada seluruh wilayah dalam suatu Negara berdasarkan kebutuhannya. Distribusi yang baik akan memberikan masyarakat komoditas pangan yang beragam dan melepaskan ketergantungan kepada salah satu komoditas pangan tertentu; (4) Keterjangkauan pangan, peningkatan ekonomi dan daya beli, infrastruktur pangan, dan preferensi pangan menjadi hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam menjangkau pangan yang telah tersedia.

Permasalahan-permasalahan yang biasanya muncul menyangkut soal ketahanan pangan menurut hasil riset (Purwaningsih, 2008) adalah penyediaan, distribusi dan konsumsi pangan. *Pertama*, ketersediaan pangan masih menjadi permasalahan yang ditemukan di lapangan. Pangan yang belum memenuhi ketersediaan karena produktivitas pangan yang menurun. Produktivitas pangan yang menurun bisa disebabkan karena berbagai hal seperti menurunnya jumlah petani aktif, berkurangnya luas lahan produktif pertanian karena alih fungsi lahan, dan kegagalan panen yang masih menjadi musuh besar bagi petani yang sedang melaksanakan produksi pangan.

Kedua, distribusi pangan yang tidak merata menyebabkan pangan bisa berlebih di satu wilayah sementara kekurangan di wilayah tertentu. Penyebab utama dari terhambatnya pendistribusian pangan yang merata adalah kondisi infrastruktur yang juga tidak merata sehingga tidak semua wilayah bisa diakses dengan mudah dalam pendistribusian pangan.

Ketiga, konsumsi pangan masih meninggalkan persoalan berkaitan dengan mutu dan gizi yang dihasilkan dari pangan tersebut. Tidak semua pangan yang dikonsumsi bisa berdampak baik pada tubuh manusia juga tidak semua pangan mampu bermanfaat bagi tubuh. Semua disesuaikan dengan kondisi dari tubuh manusia itu sendiri, hanya saja pemahaman dan pengetahuan terkait dengan konsumsi pangan yang bergizi belum dimiliki oleh semua lapisan masyarakat yang pada beberapa kalangan tertentu masih mengonsumsi pangan untuk mencari kenyang, bukan mencari sehat (Purwaningsih, 2008).

Diskursus Kepemimpinan Perempuan: Sebuah Pemetaan Kajian Terdahulu

Pada sub bagian ini, kami coba menyajikan studi-studi terdahulu yang terkait dengan topik kajian kepemimpinan perempuan. Studi yang dikerjakan oleh (Rohmah, 2002) tentang karakteristik kepemimpinan perempuan; (Hartono, 2021) kepemimpinan perempuan di era globalisasi; dan (Fitriani, 2015) gaya kepemimpinan perempuan dengan perspektif gender

komparatif. Studi-studi tersebut cenderung masih menyajikan gagasan reflektif semata yang hendak mendorong ide bagaimana perempuan sebagai pemimpin seharusnya.

Studi yang berbasis pada refleksi empiris disajikan oleh (Rozi & Wahyuni, 2017) tentang kebijakan kepemimpinan perempuan dalam pendidikan Islam yang menyoroti peran Rky Rahmah di tahun 1923 dalam mendirikan sekolah agama tingkat Diniyah khusus untuk putri. Selain itu, kajian (Artisa, 2014) menyoal tentang hambatan yang dialami oleh sang pemimpin perempuan dalam birokrasi pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. Lalu riset (Balkis, 2020) coba menyelidik gaya kepemimpinan perempuan dalam instansi publik di tingkat pemerintah pusat dengan fokus bahasan tentang Susi Pudjiastuti sebagai pemimpin perempuan di Kementerian Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019.

Adapun studi yang membedah dinamika kepemimpinan perempuan di aras lokal atau daerah (kab/kota) dapat dicek dari studi yang dikerjakan oleh (Anshor, 2008; Zahra, 2020) yang meneliti soal tantangan kepemimpinan perempuan secara struktural di bawah bayang-bayang dinasti politik dan kultural karena masih mendarah dagingnya budaya patriarki di aras lokal.

Selanjutnya riset yang cukup dekat dengan riset yang kami lakukan yaitu riset (Famelasari & Prastiwi, 2021) yang membahas kepemimpinan bupati perempuan di Bojonegoro dalam persoalan tata kelola tambang. Lalu riset (Nurrohman & Ramadhan, 2020) melacak kepemimpinan bupati perempuan di kabupaten Serang dalam menangani pandemi covid-19.

Demikian hasil pelacakan kami atas riset-riset terdahulu tentang diskursus kepemimpinan perempuan yang cukup relevan dengan gagasan dari riset ini. Kami mengerjakan riset ini sebagai upaya melanjutkan atau meneruskan kajian terkait kepemimpinan perempuan di aras lokal dengan memberikan perhatian pada daerah yang masih berkembang dan minim kekuatan finansial (APBD) seperti di Kabupaten Pandeglang. Selain itu, riset ini mengisi kekosongan atas wacana kepemimpinan perempuan di Pandeglang. Artinya riset dan hasilnya penting untuk dikerjakan dan disajikan dalam rangka memperkaya khazanah tentang peran kepemimpinan perempuan di suatu daerah yang cukup luas dalam membangun daerah dan memberdayakan masyarakatnya. Secara praktik, diskusi seperti ini diperlukan dalam rangka merawat histori atas kehadiran dan peranan kaum perempuan di bidang pemerintahan lokal, meminjam istilah Weatherford dalam (Godjali & Mayrudin, 2020) agar tidak menjadi “bab yang hilang”. Riset ini pun cukup urgen dilakukan karena adanya interseksi isu penting antara kepemimpinan perempuan dengan isu ketahanan pangan, bagaimana ia mewujudkan program-programnya untuk industri lokal dan memasyarakatkan pangan lokal guna meningkatkan taraf hidup masyarakat Pandeglang.

C. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif digunakan dalam riset ini karena mampu digunakan dalam penelitian tentang kepemimpinan perempuan dalam upayanya untuk mendorong penguatan pangan di daerah yang dipimpin karena akan mampu menggali informasi yang mendalam yang akan memudahkan peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan.

Indepth interview dilakukan kepada informan yang telah kami tetapkan sebelumnya. Observasi dilakukan langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung kondisi pangan lokal di Kabupaten Pandeglang. Studi dokumentasi juga dilakukan dalam penelitian lapangan untuk mendapatkan data dan fakta yang dibutuhkan dalam rangka menjawab pertanyaan riset ini. Pengumpulan data berupa wawancara dan observasi yang akan dilakukan menyesuaikan dengan kondisi pandemi covid-19. Apabila memungkinkan akan dilaksanakan secara

langsung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Data primer dan data sekunder menjadi sumber data dalam riset ini. Penelusuran dengan studi literatur berupa jurnal ilmiah dan literatur digital lainnya merupakan sumber sekunder yang kami dapatkan untuk memperkaya perspektif, data, dan fakta dalam riset ini.

Proses memvalidasi data dilakukan dengan metode triangulasi dari data-data dengan sumber yang berbeda serta bukti-bukti lain yang diperlukan untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren (Creswell, 2013). Informan yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive yang terkait dengan fokus riset ini seperti informan dari Dinas Pertanian Kab. Pandeglang yaitu Nasir M.D. dan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang, Heni Supiani.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Ketahanan Pangan di Pandeglang

Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu wilayah agraris yang menjadi salah satu lumbung pangan di Provinsi Banten. Predikat ini muncul karena potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pandeglang memang sangat tinggi dalam sektor agraris. Kabupaten Pandeglang bersama dengan Kabupaten Lebak memiliki lahan produktif pertanian yang masih sangat luas untuk dimanfaatkan. Jumlah petaninya pun masih banyak dan eksis sehingga ketersediaan sumber daya ini menjadi pendorong produktivitas pangan di daerah ini. Dengan segala potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pandeglang, seharusnya mampu menciptakan sebuah ketahanan pangan.

Ketahanan pangan sendiri merupakan sesuatu kondisi di mana terpenuhinya kebutuhan pangan pada setiap individu rumah tangga baik secara kualitas maupun kuantitas. Kualitas pangan merujuk kepada bagaimana pangan yang tersedia memiliki nilai gizi yang baik, bermutu, beragam, seimbang dan aman untuk dikonsumsi (Purwaningsih, 2008). Sementara kuantitas merujuk pada jumlah pangan yang tersedia mencukupi seluruh kebutuhan pangan di suatu wilayah. Secara kuantitas, ketersediaan pangan di Kabupaten Pandeglang dengan potensinya sudah sangat mencukupi bahkan surplus.

Pada tahun 2018, Pandeglang memiliki surplus pangan sehingga mampu mengeksport beras sampai ke wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Surplus ini terjadi karena Kabupaten Pandeglang di tahun 2018 mengalami panen raya besar. Namun ketersediaan pangan di Kabupaten Pandeglang ternyata tidak sepenuhnya merata pada setiap wilayah, sebagai lumbung padi ternyata Pandeglang masih terdapat desa rawan pangan.

Hasil penelitian IPB pada tahun 2019 menyatakan bahwa masih terdapat 12 daerah di Kabupaten Pandeglang yang masih mengalami kerawanan pangan. Apabila ditinjau dari konsep aksesibilitas pangan, maka kerawanan pangan ini utamanya di Kabupaten Pandeglang terjadi karena akses fisik berupa infrastruktur yang masih belum memadai ke daerah-daerah pelosok di Kabupaten Pandeglang yang menghambat akses dan distribusi pangan. Namun apabila melihat secara keseluruhan, Kabupaten Pandeglang memang mumpuni dalam ketersediaan pangan. Pada saat ini, Pandeglang menyumbang persentase 30% pangan untuk Provinsi Banten.

Ketersediaan pangan di Kabupaten Pandeglang memang tinggi, namun pada indikator yang lain seperti aksesibilitas pangan dan pemanfaatan pangan, masih terdapat berbagai macam permasalahan yang harus diselesaikan untuk menjaga ketahanan pangan. Seperti disinggung sebelumnya, aksesibilitas pangan di Pandeglang memang masih menjadi permasalahan utama. Akses ekonomi di mana masyarakat Pandeglang masih banyak yang masuk kategori pra-sejahtera membuat kemampuan mereka terbatas untuk membeli pangan karena tidak punya kekuatan ekonomi yang cukup. Berdasarkan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kabupaten Pandeglang, tercatat ada 113.344 kepala keluarga yang

masuk dalam kategori pra-sejahtera. Berbagai bantuan yang datang pun untuk mendekatkan akses pangan ke masyarakat belum sepenuhnya merata dan tepat sasaran. Hal ini membuat bantuan sosial belum bisa menjadi solusi atas akses ekonomi terhadap pangan di Kabupaten Pandeglang. Akses fisik seperti masih belum layak infrastruktur utamanya akses jalan turut menghambat distribusi pangan ke daerah-daerah yang terpencil dan sulit terjangkau. Kondisi ini membuat potensi rawan pangan muncul karena distribusi pangan yang tersendat pada beberapa daerah.

Sementara pada konsumsi dan pemanfaatan pangan, Pandeglang juga masih memiliki beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Paradigma dan kebiasaan masyarakat Pandeglang yang sangat bergantung pada komoditas beras membuat mereka sulit untuk mencoba preferensi pangan yang lain. Padahal pangan tidak hanya beras, namun segala sesuatu yang bisa dikonsumsi dan bernilai gizi, itu bisa menjadi alternatif pangan. Kesadaran masyarakat akan kecukupan gizi dalam mengonsumsi pangan pun masih minim. Masih banyak warga masyarakat yang makan hanya untuk mencari enak di lidah maupun mencari kenyang saja, tetapi tidak memperhatikan kecukupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuhnya sebagai seorang manusia.

Atas kondisi tersebut yang menunjukkan Pandeglang masih memiliki berbagai permasalahan pangan meskipun memiliki potensi pangan yang tinggi, perlu adanya upaya dari seorang pemimpin untuk bisa menyelesaikan permasalahan pangan ini agar Kabupaten Pandeglang bisa menjadi daerah yang mampu mencapai ketahanan pangan dan memastikan masyarakatnya semua terpenuhi kebutuhan pangannya baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Seorang pemimpin dituntut untuk bisa menyelesaikan permasalahan di daerahnya karena ia merupakan aktor utama pengambil kebijakan di daerah. seorang kepala daerah memiliki kekuasaan dan wewenang untuk menetapkan sebuah kebijakan dan program dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kedua hal tersebut bisa tercapai dengan menjaga stabilitas pangan yang ada. Bupati punya kekuasaan dan punya sumber daya di daerahnya untuk mencapai hal tersebut, maka dari itu pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memengaruhi, mendorong, dan menggerakkan anggotanya juga masyarakat agar bisa bekerja sama dan bahu membahu mencapai tujuan dalam hal ini adalah mencapai ketahanan pangan.

Bupati Irna Narulita

Kepemimpinan Irna Narulita sebagai Bupati Pandeglang menarik untuk ditelisik secara mendalam. Mari kita mulai dari aktivitasnya sebelum menjadi Bupati. Irna lahir di Jakarta pada 23 Juli 1970. Ia terbilang sebagai perempuan berpendidikan tinggi karena berhasil menyelesaikan pendidikan S1 di Bidang Ekonomi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Supra Jakarta. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi mengambil program magister (S2) bidang manajemen di Universitas Indonusa Esa Unggul Jakarta.

Irna menikah dengan Dimiyati Natakusumah dianugerahi tiga orang anak, yaitu Rizka Amalia Ramadhani Natakusumah, Rizki Aulia Rahman Natakusumah, dan Risya Azzahra Rahimah Natakusumah (Rifa'i, 2018). Harta kekayaan Irna yang dilaporkan pada 2020 sebesar Rp. 49,2 miliar. Sebagian besar harta kekayaannya berupa bidang tanah dan bangunan yang senilai Rp. 48 miliar (Rifa'i, 2020).

Adapun sepak terjang karier politik Irna yang merupakan istri dari tokoh penguasa Kabupaten Pandeglang yaitu Dimiyati Natakusumah langkahnya masuk ke jalur pemerintahan melalui kandidasi dan kompetisi politik elektoral tidak begitu mulus. Pertama masuk dunia politik, yaitu pada Pilkada 2010 Pandeglang. Irna maju sebagai Calon Wakil Bupati

mendampingi Apud Mahpud. Sayangnya, pasangan tersebut hanya mampu meraih 41,27 persen suara, dikalahkan oleh pasangan Erwan dan Heryani dengan memperoleh 49,62 persen.

Pada 2015, Irna kembali maju mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah pada Pilkada Kabupaten Pandeglang periode 2016-2021. Kali ini ia maju sebagai calon Bupati dan didampingi oleh menantu Ratu Atut Chosiyah yaitu Tanto Warsono Arban dengan hampir memborong dukungan dan usungan partai dan berhasil mendapat dukungan sembilan partai yakni PPP, PKB, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Hanura, PKS, PAN, PBB, dan PKPI. Pada pilkada tersebut ada tiga calon pasangan yang sudah ditetapkan KPU yaitu: (1) Aap Aptadi-Dodo Djuanda dari jalur independen; (2) Irna-Tanto (sembilan partai); (3) Siti Romlah-Yan Riyadi (dua partai politik).

Pasangan Irna dan Tanto yang didukung oleh koalisi gemuk berhasil menjadi pemenang dengan memperoleh 367.547 suara, mengalahkan Siti Romlah-Yan Riyadi dan Aap Aptadi-Dodo Djuanda dari jalur independen. Kemudian pada pilkada periode 2021-2026, Irna dan Tanto maju sebagai calon petahana yang solid mengumpulkan partai pengusung dan pendukungnya. Pasangan petahana ditantang oleh pasangan Thoni Fathoni Mukson dan Miftahul Tamamy (Thoni-Imat) yang didukung dua partai yaitu PKB dan PPP. Hasilnya pasangan Irna-Tanto berhasil menjadi pemenang dengan raihan 389.367 suara. Lawannya hanya mampu meraih 223.220 suara.

Berikut ini visi dan misi Bupati Pandeglang. Visi Bupati saat ini adalah "*Pandeglang Berkah, Berdaya saing, dan Sejahtera*". Adapun misi yang ditetapkan yang berkaitan dengan ketahanan pangan terdapat pada misi ke-4 yaitu "*Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan sentra industri kecil dan menengah*". Misi ini dijabarkan salah satunya adalah upaya mengembangkan pangan lokal untuk preferensi pangan dalam rangka mencapai ketahanan pangan di Kabupaten Pandeglang.

Upaya Bupati Irna dalam Ketahanan Pangan dan Penguatan Pangan Lokal

Kepemimpinan perempuan merupakan salah satu isu yang menarik untuk dibahas terlebih di Provinsi Banten yang memiliki keterwakilan perempuan lebih dari 30% di tingkat kepala daerah. Untuk mengukur seorang pemimpin perempuan masuk atau tidak dalam kualifikasi pemimpin, (Kartono, 2009) menyatakan empat aspek yaitu, memiliki kemauan untuk memikul tanggung jawab, Kemampuan untuk menetapkan prioritas secara tepat, kemampuan untuk menanggapi secara objektif, dan kemampuan untuk berkomunikasi.

Dalam permasalahan ketahanan pangan, sebagai seorang kepala daerah dituntut untuk mampu menciptakan dan menjaga stabilitas pangan di daerahnya. Atas tanggung jawab itu, pemimpin harus merencanakan dan menetapkan strategi dan langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Berbagai hal yang dilakukan di antaranya adalah mendorong konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Sebagai seorang pemimpin, sudah sepatutnya Bupati Irna mendorong upaya pemanfaatan pangan dengan menekankan konsumsi pangan yang B2SA.

Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pangan yang baik, namun masyarakat masih kurang memperhatikan gizi dari pangan yang dikonsumsi. Masih banyak masyarakat yang makan hanya untuk mencari kenyang tanpa melihat kandungan gizi, juga masih banyak masyarakat yang mengonsumsi pangan yang disukai tanpa melihat kandungannya. B2SA juga mendorong upaya diversifikasi pangan karena mendorong masyarakat untuk mengonsumsi pangan yang beragam. Nasi memang masih menjadi makanan pokok yang dikonsumsi, namun komoditas pangan lain yang tersedia di Pandeglang seperti jagung, singkong, dan ubi bisa menjadi alternatif untuk memperkaya pilihan pangan di masyarakat. Hanya saja kembali lagi, bahwa paradigma masyarakat yang masih berpikir bahwa makan berat adalah hanya dengan makan nasi menjadi satu

permasalahan lain yang harus diselesaikan dengan menggalakkan edukasi pangan kepada masyarakat (wawancara dengan Nasir, 2021).

Maka mendorong konsumsi B2SA menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki pemanfaatan dan konsumsi pangan di Kabupaten Pandeglang. Selain itu, untuk mendorong konsumsi B2SA, Ina sebagai Bupati Pandeglang juga menggelar lomba cipta menu B2SA yang diselenggarakan di tingkat Kabupaten, agar muncul sebuah menu baru yang bisa dijadikan pilihan pangan kepada masyarakat untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada pangan beras saja (wawancara dengan Heni, 2021).

Dalam upaya mendorong ketahanan pangan, Ina juga berupaya menjalin kerja sama dengan berbagai sektor seperti salah satunya adalah kerja sama yang dijalin dengan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten. Dalam kerja sama ini sangat menguntungkan Kabupaten Pandeglang karena BI Banten membawa beberapa program yaitu pengembangan sektor pertanian dan UMKM. Dari program ini akan terbangun penguatan ketahanan pangan melalui sistem ekonomi dan keuangan digital melalui kegiatan “*Business Matching*” yang ujungnya akan mendorong peningkatan produk unggulan lokal Pandeglang ke pasar domestik, nasional, dan luar negeri (AntaraNew.com, 2021; BantenNews.co.id, 2021; RadarBanten.co.id, 2021)

Dengan adanya kerja sama ini akan lebih memberikan semangat dan meningkatkan minat masyarakat untuk terjun pada sektor pertanian yang selama ini selalu mengalami penurunan akan jumlah petani di Pandeglang. Masalah degenerasi petani memang menjadi permasalahan yang terjadi di berbagai wilayah agraris. Petani yang saat ini eksis adalah petani yang berusia senja sehingga akan mendekati masa pensiun, namun petani muda belum banyak muncul dan berminat menjadi petani. Apabila permasalahan ini tidak segera diatasi, maka akan terjadi kelangkaan petani yang secara simultan juga akan berdampak pada penurunan produksi pangan di Kabupaten Pandeglang. Maka upaya untuk mendorong pemuda yang aktif terjun sebagai petani adalah hal yang baik untuk mendorong produktivitas dan stabilitas pangan yang akan membuat ketahanan pangan terjaga di Kota Santri ini.

Dalam menetapkan prioritas, Bupati Ina sudah menunjukkannya dengan mencanangkan program seperti yang telah dijelaskan di atas untuk menjaga stabilitas pangan. Pangan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan warga masyarakat karena pangan adalah kebutuhan pokok yang membuat sumber daya tetap bisa bertahan dan beraktivitas. Pangan yang cukup. Pangan yang cukup akan membuat masyarakat bisa berdaya karena energi dan kecukupan gizi terpenuhi. Sebaliknya ketika pangan tidak bisa dipenuhi, maka masyarakat akan kekurangan gizi sehingga tidak memiliki energi yang cukup untuk mengaktualisasikan dirinya dan bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Maka setiap pemimpin memang perlu untuk memprioritaskan pangan di daerahnya.

Objektivitas yang ditunjukkan juga berkaitan dengan sebuah konsekuensi logis yang dimiliki oleh Kabupaten Pandeglang sebagai pemilik potensi pertanian yang tinggi dan lumbung pangan di Provinsi Banten, perlu seorang pemimpin memaksimalkan segala sumber daya yang ada. Upaya mendorong produktivitas pangan oleh Bupati Ina telah dilakukan yang pada masa kepemimpinannya pernah mencapai panen raya pangan dan surplus pangan. Kondisi ini membuat Pandeglang mampu mengeksport pangan sampai ke Jakarta hingga Jawa Barat.

Sementara dari komunikasi yang dibangun, Ina sebagai Bupati sangat interaktif dengan masyarakat karena dia juga aktif dalam media sosial di instagram. Upaya sosialisasi pangan juga berulang kali dilakukan melalui beberapa unggahan di media sosial yang bisa ditanggapi oleh masyarakat.

Gambar 1. Unggahan Irna Soal Ketahanan Pangan



Sumber: Instagram Irna Narulita Dimiyati

Komunikasi digital yang dibangun ini merupakan sebuah adaptasi gaya komunikasi pemimpin yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tidak jarang juga Irna membalas dan memberikan umpan balik dari komentar dan pertanyaan yang disampaikan warga masyarakat kepadanya melalui media sosial.

Menyelisik Kepemimpinan Bupati Irna

Dalam bagian ini kami mendiskusikan kepemimpinan Bupati Irna dengan menggunakan konsepsi Burns yaitu (1) bagaimana proses seorang pemimpin mendorong pengikutnya untuk bertindak demi tujuan tertentu, dan (2) bagaimana ia memobilisasi sumber daya institusional, politis, psikologis dan sumber-sumber lainnya untuk membangkitkan, melibatkan, dan memenuhi motivasi pengikutnya.

Pertama, Irna sebagai seorang pemimpin pada umumnya, ia juga menempatkan orang-orang kepercayaannya yang berkompeten untuk mendorong kinerja instansi secara optimal. Pada 2020 ia melakukan rotasi jabatan dan menempatkan sosok Heni Supiani yang sebelumnya menjabat di Dinas Pertanian Pandeglang kemudian dipromosikan menjadi Kabag di Dinas Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang.

Dari wawancara kami dengan Heni, memang terlihat bahwa ia memiliki pandangan progresif dan menarik tentang program-program penguatan pangan lokal, seperti: keinginan akan adanya “KAPALOK” yaitu kawasan pangan lokal. Selain itu “PANGLAKU” sebuah rancangan aplikasi inovatif bersifat daring yang menyediakan informasi tentang produk-produk olahan pangan lokal dan juga berfungsi juga sebagai wadah jual beli atau *market place*.

Sebagai seorang pemimpin, Irna memiliki pembawaan yang “dekat” dan “menyentuh” meski dengan bawahannya. Pada saat pelantikan promosi jabatan di lingkungan pemerintah Pandeglang, Bupati Irna berpesan secara khusus kepada Heni sebagai pejabat baru di Dinas Ketahanan Pangan Pandeglang. Ia berpesan “*Teh.... bantu ketahanan pangan, jangan pangan lokal potensi kita hilang*” (wawancara dengan Heni, 2021). Atas dasar itu, Heni merasakan bahwa kepercayaan yang diberikan kepadanya tidak boleh mengecewakan “Ibu”, maka meski di tengah dampak pandemi Covid-19, Heni tetap merancang dan coba melaksanakan agenda-agenda penguatan pangan lokal. Hal ini merupakan bentuk dorongan secara persuasif yang dilakukan Bupati Irna kepada jajarannya agar mencapai target atau tujuan yang dikehendaki.

Kedua, memobilisasi sumber daya institusional, politis, psikologis dan sumber-sumber lainnya untuk membangkitkan, melibatkan, dan memenuhi motivasi pengikutnya. Dalam hal ini Bupati Irna memanfaatkan peluang-peluang yang ada secara institusional menjalin kerja sama dengan berbagai instansi di bawahnya. Seperti mendorong sinergi antara dinas yang terkait dengan penguatan pangan lokal (*Talas Beneng* dan *Porang*) seperti dinas pertanian, dinas ketahanan pangan, dinas perindustrian perdagangan, dan dinas-dinas lainnya. Hasilnya

terlihat dari komoditas Talas Beneng dan Porang menjadi komoditas unggulan untuk ditawarkan ke daerah lain bahkan sudah ekspor (wawancara dengan Nasir dan Heni, 2021).

Di samping itu, upaya Bupati lainnya secara non-struktural adalah melibatkan kelompok perempuan atau ibu-ibu yang berada dalam naungan Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai pelaku yang diberdayakan dalam membuat olahan pangan lokal yang juga difasilitasi oleh Bupati untuk bekerja sama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). Contoh suksesnya ialah diproduksinya beras Arben (wawancara dengan Heni, 2021).

Meski demikian, bukannya tidak ada hambatan dan rintangan dalam upaya penguatan ketahanan pangan berbasis pada pangan lokal di Pandeglang. Seperti refleksi dari paparan Nasir yang menyebut bahwa "*sentuhan [pemerintah pusat] terhadap komoditas [pangan lokal di Pandeglang] masih minim dikarenakan kalau pusat menganggarkan komoditas PAJALE [padi, jagung, kedelai]*" (wawancara dengan Nasir, 2021). Artinya perlu adanya bantuan stimulasi dari pemerintah pusat dan provinsi guna membantu daerah-daerah yang minim anggaran seperti daerah Pandeglang dalam optimalisasi kekayaan pangan lokal yang begitu potensial di daerah ini.

E. PENUTUP

Dari hasil temuan lapangan ditemukan bahwa Kabupaten Pandeglang merupakan wilayah agraris yang memiliki potensi pangan yang tinggi dan menjadi lumbung pangan Provinsi Banten. Dengan segala potensi yang dimiliki, Bupati Irna dalam ketahanan pangan sejauh ini telah memaksimalkan segala sumber daya yang dimiliki. Beberapa program seperti B2SA telah dilakukan untuk mendorong konsumsi pangan masyarakat dan mengkapitalisasi pangan lokal seperti talas beneng dan porang yang sudah masuk sebagai kategori komoditas ekspor.

Gaya kepemimpinan yang dilakukan sudah memenuhi beberapa kualifikasi seorang pemimpin seperti tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, upaya menjadikan pangan sebagai prioritas, objektivitas dalam melihat sebuah potensi daerah yang dimiliki, serta komunikasi yang dibangun sangat aktif kepada masyarakat dengan berbagai platform baik secara langsung maupun melalui media sosial tentang ketahanan pangan.

Sedangkan bila ditelisik dari perspektif kepemimpinan Burns, Bupati Irna sebagai pemimpin perempuan cenderung lebih transformasional karena mampu mendorong dan mengkapitalisasi sumber daya yang melekat secara struktural dan non-struktural guna mencapai tujuan yang diharapkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Riset ini didanai oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Atas dasar itu, tim penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada lembaga-lembaga tersebut. Kemudian juga menyampaikan terima kasih kepada Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang atas kesediaan wawancara mendalam dan pengumpulan data sangat yang berguna untuk penyelesaian riset ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaslan, A. (2017). Persepsi Masyarakat Dan Kepemimpinan Perempuan. *Jurnal OTONOMI-STIA TRINITAS*, 10(20), 1–15.
- Anshor, M. U. (2008). Tantangan Kepemimpinan Perempuan di Tingkat Lokal. *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak*, 3(1), 81–88. Retrieved from <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/view/189>

- AntaraNews.com. (2021). BI dan Pemkab Pandeglang jalin kerja sama pengembangan ekonomi. Retrieved from <https://www.antaraneews.com/video/1996100/bi-dan-pemkab-pandeglang-jalin-kerja-sama-pengembangan-ekonomi>
- Arndt, C., Davies, R., Gabriel, S., Harris, L., Makrelov, K., Robinson, S., ... Anderson, L. (2020). Covid-19 lockdowns, income distribution, and food security: An analysis for South Africa. *Global Food Security*, 26(July), 100410. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100410>
- Artisa, R. A. (2014). Perempuan dalam Birokrasi Hambatan Kepemimpinan Perempuan dan Birokrasi Pemerintah Provinsi DIY. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 8–15.
- Balkis, A. H. (2020). Gaya Kepemimpinan Perempuan Dalam Instansi Publik: Studi Kasus Susi Pudjiastuti. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 8(1), 79–88. <https://doi.org/10.31629/juan.v8i1.2271>
- BantenNews.co.id. (2021). Bank BI Banten dan Pemkab Pandeglang Jalin Kerja Sama Pengembangan Ekonomi. Retrieved from <https://www.bantennews.co.id/bank-bi-banten-dan-pemkab-pandeglang-jalin-kerja-sama-pengembangan-ekonomi/>
- Bass, B. M., & Bass, R. (2008). *The Bass Handbook of Leadership: THEORY, RESEARCH, AND MANAGERIAL APPLICATIONS* (Fourth Ed). New York: Free Press.
- Burns, J. M. (1978). *Leadership*. In *Integrated Media*. New York.
- Cahya, M. R., Wibowo, A. S., & Bukhari, A. (2018). Keberlanjutan Ketersediaan Beras Di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 11(2), 181. <https://doi.org/10.33512/jat.v11i2.5095>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Third Edit). California: SAGE Publication.
- Famelasari, R., & Prastiwi, J. H. (2021). Kepemimpinan Perempuan dan Tata Kelola Tambang di Bojonegoro. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 126–147. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10198>
- Farcas, A. C., Galanakis, C. M., Socaciu, C., Pop, O. L., Tibulca, D., Paucean, A., ... Socaci, S. A. (2021). Food security during the pandemic and the importance of the bioeconomy in the new era. *Sustainability (Switzerland)*, 13(1), 1–11. <https://doi.org/10.3390/su13010150>
- Fitriani, A. (2015). Gaya Kepemimpinan Perempuan. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam (TAPIS)*, 11(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v11i2.845>
- Godjali, M. R., & Mayrudin, Y. M. (2020). PARTISIPASI PEREMPUAN MELALUI ORGANISASI NON PEMERINTAH FATAYAT DAN MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA DALAM PENANGANAN COVID-19. *JURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah)*, 6(1), 1–19.
- Grint, K. (2011). A History of Leadership. In A. Bryan, D. Collinson, K. Grint, B. Jackson, & M. Uhl-Bien (Eds.), *The Sage Handbook of Leadership*. London: SAGE Publication.
- Hamadani, J. D., Hasan, M. I., Baldi, A. J., Hossain, S. J., Shiraji, S., Bhuiyan, M. S. A., ... Pasricha, S. R. (2020). Immediate impact of stay-at-home orders to control COVID-19 transmission on socioeconomic conditions, food insecurity, mental health, and intimate partner violence in Bangladeshi women and their families: an interrupted time series. *The Lancet Global Health*, 8(11), e1380–e1389. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(20\)30366-1](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30366-1)
- Hartono, R. (2021). Kepemimpinan Perempuan di Era Globalisasi. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 82–99.
- Kartono, K. (2009). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

- Keating, C. J. (1986). *Kepemimpinan: Teori dan Pengembangannya* (A. M. Mangunhardjana, ed.). Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Kuiper, M., & Cui, H. D. (2021). Using food loss reduction to reach food security and environmental objectives – A search for promising leverage points. *Food Policy*, 98(June 2020), 101915. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2020.101915>
- Laborde, D., Martin, W., Swinnen, J., & Vos, R. (2020). COVID-19 risks to global food security. *Science*, 369(6503), 500–502. <https://doi.org/10.1126/science.abc4765>
- Mishra, K., & Rampal, J. (2020). The COVID-19 pandemic and food insecurity: A viewpoint on India. *World Development*, 135, 105068. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105068>
- Molotoks, A., Smith, P., & Dawson, T. P. (2021). Impacts of land use, population, and climate change on global food security. *Food and Energy Security*, 10(1), 1–20. <https://doi.org/10.1002/fes3.261>
- Nchanji, E. B., & Lutomia, C. K. (2021). Regional impact of COVID-19 on the production and food security of common bean smallholder farmers in Sub-Saharan Africa: Implication for SDG's. *Global Food Security*, 29(January), 100524. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2021.100524>
- Nicholson, C. F., Stephens, E. C., Jones, A. D., Kopainsky, B., Parsons, D., & Garrett, J. (2021). Food security outcomes in agricultural systems models: Current status and recommended improvements. *Agricultural Systems*, 188, 103028. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2020.103028>
- Nurrohman, B., & Ramadhan, G. (2020). Kepemimpinan Perempuan di Masa Krisis: Studi Kasus Bupati Serang dalam Penanganan Covid-19. *Ijd-Demos*, 2(3), 271–282. <https://doi.org/10.37950/ijd.v2i3.67>
- Purwaningsih, Y. e. (2008). Ketahanan Pangan : Situasi, Permasalahan, Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9 No. 1, 1–27.
- RadarBanten.co.id. (2021). Pulihkan Perekonomian Masyarakat, Pemkab-BI Jalin Kerja Sama. Retrieved from <https://www.radarbanten.co.id/pulihkan-perekonomian-masyarakat-pemkab-bi-jalin-kerja-sama/>
- Rifa'i, B. (2018, September). 3 Anak Natakusumah yang Nyaleg DPR Lulusan Amerika dan Inggris. *News.Detik.Com*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-4226506/3-anak-natakusumah-yang-nyaleg-dpr-lulusan-amerika-dan-inggris>
- Rifa'i, B. (2020, September). Cabup Pandeglang Irna Narulita Miliki Harta Kekayaan Rp 49,2 Miliar. *News.Detik.Com*. Retrieved from https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5187965/cabup-pandeglang-irna-narulita-miliki-harta-kekayaan-rp-492-miliar?_ga=2.173796645.762307086.1635263968-210629935.1625541257
- Rohmah, N. R. (2002). Karakteristik Kepemimpinan Perempuan. *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, 32–48.
- Rozi, S., & Wahyuni, D. (2017). Kebijakan Kepemimpinan Perempuan dalam Pendidikan: Refleksi atas Kepemimpinan Rky Rahmah El Yunusiyah. *ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies*, 3(1). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/islam_realitas.v3i1.273 Diterima:
- Sastrosupandi, A. (2019). KETAHANAN PANGAN DAN BEBERAPA ASPEKNYA. *Buana Sains*, 19(2), 47–52.
- Silva, A. (2016). What is Leadership? *Journal of Business Studies Quarterly*, 8(1), 1–5. Retrieved from <https://search.proquest.com/openview/da932f3ddd496ce36e7f30f9e133b141/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1056382>

- Suharyanto, H. (2011). KETAHANAN PANGAN. *Sosial Humaniora*, 4(2), 186–194. Retrieved from <http://iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/view/633/355>
- Sumantri, A. T., Hermita, N., Riyanto, R. A., & Mulyaningsih, A. (2021). Ketersediaan Sumberdaya Lahan Dan Aksesibilitas Dalam Upaya Mendukung Penyelenggaraan Ketahanan Pangan. *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 14(1), 98. <https://doi.org/10.33512/jat.v14i1.11461>
- Suryana, A. (2008). Menelisik Ketahanan Pangan, Kebijakan Pangan, dan Swasembada Beras. *Pengembangan Inovasi Pertanian*, 1((1)), 1–16. Retrieved from <http://www.pustaka.litbang.deptan.go.id/publikasi/ip011081.pdf>
- Winston, B., & Patterson, K. (2006). An integrative definition of leadership. *International Journal of Leadership Studies*, 1(2), 6–66.
- Yukl, G. (2001). *Leadership in Organization* (Fifth Edit). New Jersey: Prentice-Hall.
- Zahra, E. F. (2020). Kepemimpinan Perempuan di Balik Bayang–Bayang Patriarki: Studi Kasus Terhadap Peran Perempuan dalam Ranah Politik Lokal. *Ijd-Demos*, 2(1), 68–77. <https://doi.org/10.37950/ijd.v2i1.32>
- Zurayk, R. (2020). Pandemic and Food Security: A View from the Global South. *Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development*, 9(3), 1–5. <https://doi.org/10.5304/jafscd.2020.093.014>